



## Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kabupaten Poso

### *Implementation of The Village Fund Policy in Development Implementation In Poso District*

Moh. Rusli Syuaib <sup>a,1</sup>, Fitri Y. Alim <sup>b,2\*</sup>

<sup>a, b</sup> Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

<sup>1</sup> moh.rusli5@yahoo.co.id; <sup>2</sup> fivie.alim@yahoo.com\*

\*korespondensi penulis

| INFO ARTIKEL                                                                                                                                                                                          | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riwayat Artikel:</b></p> <p>Diterima: 18-01-2020<br/>Disetujui: 21-03-2020</p> <hr/> <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Implementation, Village Fund, Development Implementation in Poso District</p> | <p><b>Abstrak:</b> Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Poso. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menggambarkan hasil analisis implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dengan kata-kata atau kalimat sesuai permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk konten kebijakan menemukan 5 (Lima) aspek yang diimplementasikan. Ada 4 aspek belum terlaksana baik yaitu 1). Kepentingan yang dipengaruhi. 2) Manfaat yang diperoleh. 3) Perubahan yang diharapkan dan 4). Komitmen sumber daya manusia, dan ada 1 (Satu) aspek pada dimensi konten kebijakan yang berhasil dilaksanakan, yaitu Kedudukan pembuat kebijakan. Pada konteks implementasi kebijakan ada 2 (dua) aspek yang berhasil dilaksanakan yaitu 1 kekuasaan kepentingan dan strategi aktor dan 2) kepatuhan dan daya tanggap. Pada konteks implementasi kebijakan dana desa (DD) ada aspek yang belum dilaksanakan dengan baik yakni karakteristik lembaga.</p> <p><b>Abstract:</b> The purpose of the study was to analyze the implementation of Village Fund policy and the inhibiting factors for implementing the Village Fund policy in the implementation of development in Poso Regency. The research method used is descriptive qualitative, namely describing the results analysis of the implementation of Village Fund policy with words or sentences according to the existing problems. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that for policy content there are 5 (five) aspects that are implemented. There are 4 aspects that have not been implemented well, namely 1). Influenced interests. 2) Benefits obtained. 3) Expected changes and 4). Human resource commitment, and there is 1 (one) aspect of the policy content dimension that has been successfully implemented, namely the position of policy makers. In the context of policy implementation there are 2 (two) aspects that have been successfully implemented, namely 1) power of interest and strategy of actors and 2) compliance and responsiveness. In the context of implementing the Village Fund policy, there are aspects that have not been implemented properly, namely the characteristics of the institution.</p> |



## PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa (DD) secara jelas tertuang dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki peluang untuk bangkit dan membangun secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini bisa dilihat dari amanat Undang-Undang dimana desa di Indonesia mendapatkan transfer dana langsung dari APBN. Kebijakan dana desa bertujuan untuk

meningkatkan kemandirian desa serta wujud penguatan otonomi desa. Dengan adanya dana desa diharapkan desa dapat lebih mandiri dan dapat membiayai kegiatan - kegiatan di desa secara swakelola. Adapun penggunaan dana desa di peruntukan bagi bidang-bidang sebagai berikut:

a. Bidang pembangunan desa meliputi yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar meliputi pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi energi dan informasi dan komunikasi.

b. Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas.

Salah satu urgensi Dana Desa yakni menempatkan desa sebagai basis desentralisasi, kebijakan itu merupakan instrumen yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan sisi lain menjadi arena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang mengelola pemerintahan desa seperti pemerintah desa (Pemdes), Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Kebijakan ini penting karena tiga alasan, yaitu: (1) Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan, (2) Komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom, dan (3) Desentralisasi di tingkat Desa akan meningkatkan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kabupaten Poso memiliki 142 desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan kebijakan nasional Dana Desa tentunya sebagai sebuah kebijakan yang harus diimplementasikan untuk kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. Pada prinsipnya implementasi kebijakan Dana Desa Kabupaten Poso ditujukan pada empat hal pokok yakni sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung oleh dana dalam melaksanakan tugas - tugasnya di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Namun kenyataannya bahwa sejak diberlakukan kebijakan tersebut di Kabupaten Poso implementasi kebijakan dana desa belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal tersebut berdasarkan fakta empirik yang diperoleh pada media kompas 3 juni 2016 bahwa bendahara desa diduga bunuh diri akibat penyimpanan dana desa, selain itu kepala desa ditangkap oleh aparat penegak hukum karena penyalahgunaan dana desa seperti kegiatan fiktif, *mark up* harga, *mark up* jumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan yang masih membutuhkan pembenahan dan profesionalisme dalam diri seorang aparatur desa.

Selain itu pada konteks dana desa tingkat kepuasan masyarakat belum sesuai dengan harapan masyarakat atau dengan kata lain masih ada keraguan masyarakat mengenai implementasi kebijakan dana desa tersebut hal tersebut berdasarkan data yang di peroleh pada media lokal [www.metrosulawesi.com](http://www.metrosulawesi.com), 4 Juni 2016 bahwa salah satu bendahara desa Buyumpondoli Kecamatan Pamona Puselembah ditemukan tewas gantung diri karena merasa malu setelah pemeriksaan penggunaan dana desa Tahun 2012. Inspektorat Kabupaten Poso menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran. Selain itu pemeriksaan tim

inspektorat Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di Kecamatan Poso Pesisir Selatan ditemukan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan yakni Desa Pantangolembah yaitu dengan tidak membuat prasasti sebanyak 5 buah, terdapat ketekoran kas sejumlah Rp.46.309.386,- (Empat puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dan pengelolaan dan peyertaan modal bumdes dan pemanfaatan mobil kendaraan pedesaan belum dikelola dengan baik, dengan demikian pemerintah Kabupaten Poso perlu megantisipasi kondisi ini untuk memberikan solusi kebijakan kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat untuk memberikan pelajaran agar taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Poso.

Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan Dana dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sejak di terapkan kebijakan dalam bentuk peraturan bupati tentang Dana Desa di Kabupaten Poso (Peraturan Bupati Poso No 7 tahun 2017) tentang Peraturan Bupati Poso No 7 tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, yang bertujuan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung oleh dana dalam melaksanakan tugas - tugasnya di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive yakni menetapkan 9 orang dengan kategori yakni 3 (Tiga) dari unsure pemerintah, 6 (Enam) dari unsur desa. Sampel area ditetapkan di 3 (tiga) desa yang menjadi lokasi penelitian. Instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dan Teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Griddle. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- a. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.
- b. Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya.
- c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Poso

Berdasarkan teori *Merilee S. Grindle* dengan sembilan aspek yang dijadikan sebagai pisau analisis sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian lapangan dan mengutip hasil wawancara dengan para informan, Sembilan aspek tersebut turut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya sembilan aspek tersebut dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Konten Kebijakan (isi kebijakan)

##### 1. Kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*)

Merilee S. Grindle beranggapan bahwa kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Kebijakan Dana Desa (DD) dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat Kabupaten Poso. Hal ini karena Kebijakan Dana Desa (DD) sudah sejak lama menjadi harapan masyarakat tersebut. Kebijakan akan mendapatkan dukungan dari warga agar dapat mengimplementasikan dengan baik. Oleh sebab itu kebijakan yang dibuat hendaknya dapat memuat kepentingan-kepentingan dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat sebagai kelompok sasaran (Grindlee 2008:116). Berdasarkan temuan penelitian pada implementasi kebijakan dana desa yang di gelontorkan di Kabupaten Poso adalah kebijakan yang dibuat tentunya memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya sehingga akan mempengaruhi kepentingan berbagai pihak seperti pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan desa, gorong-gorong serta pembuatan drainase tetapi disisi lain untuk program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui perekonomian desa dengan pemberian modal usaha yang tujuannya mengatasi kesenjangan masyarakat desa

##### 2. Tipe Manfaat (*type of benefits*)

Manfaat program dana desa yang dilakukan pemerintah tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat tetapi kedepan akan dirasakan manfaatnya dari pembangunan yang ada dan bisa dimanfaatkan oleh banyak desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa. Adapun Manfaat dana desa adalah sebagai berikut: 1. Pengentasan kemiskinan. 2. Pemerataan pembangunan 3. Menahan lajunya urbanisasi. Berdasarkan temuan penelitian dana desa yang diberikan pemerintah pusat kedesa mengalami perubahan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat hal ini bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Poso. Selain itu penggunaan dana desa yang memanfaatkan potensi dan tenaga kerja lokal dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk

memperbaiki perekonomiannya antara lain bisa terlihat dari jumlah pengangguran dan kemiskinan mengalami penurunan.

### 3. Derajat Perubahan (*Extent of change envisioned*)

Setiap kebijakan yang diimplementasikan tentu mengharapkan suatu perubahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dikemukakan oleh Agustino (2008:155), “setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan dengan skala yang jelas” Berkaitan dengan hal tersebut diatas berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan bahwa dengan adanya program dana desa desa yang sebelumnya identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan bisa berubah dan berkembang dan dapat mengubah wajah desa dan pandangan orang terhadap desa tersebut. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan program dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat pada prinsipnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pemeratan pembangunan di desa.

### 4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)

Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan merupakan hal sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut harus jelas agar lebih fokus dalam pelaksanaannya, terkait dengan kebijakan dana desa yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam menentukan program dalam implementasi dana desa dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat

### 5. Pelaksana program` (*Program Implementors*)

Suatu kebijakan yang dibuat akan menjadi bermakna jika diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksananya agar mencapai tujuan yang diharapkan, kebijakan dana desa selain menjadikan Kabupaten Poso sebagai daerah yang maju dan sejahtera juga hendak mencapai hasil tertanggulangnya masalah kemiskinan, hasil penelitian dilapangan menunjukkan beberapa pelaksana kebijakan dana desa yang dibentuk guna mensukseskan kebijakan tersebut adalah:

#### a. Tingkat Pemerintah Kabupaten

Kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme desentralisasi dan tugas pembantuan, salah satunya untuk memperlancar kebijakan tersebut pada tingkat kabupaten dibentuk tim Pembina dan tim teknis berdasarkan Tugas pokok dan fungsi SKPD yang ada di kabupaten seperti Badan PMD, BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian Keuangan, semua merupakan tim teknis dan dalam pelaksanaan tugas dilapangan tim teknis Kabupaten dibantu oleh para pendamping dana desa. Pendamping dana desa yang ditempatkan pada setiap desa. Tenaga ini sering juga disebut sebagai pendamping desa .

#### b. Tingkat Kecamatan

Pada tingkat Kecamatan yaitu melakukan monitoring dan pengawasan tentang APB Desa dimana camat membuat rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang merupakan hasil musyawarah di desa.

c. Tingkat desa

Pada tingkat desa adanya tim pelaksana pada tingkat desa yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa serta di bantu BPD dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Berbagai tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dalam mendukung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku tim teknis pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **6. Sumber daya yang dilibatkan (*resources committed*)**

Sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam kebijakan dana desa bersumber dari pemerintah yaitu aparatur pemerintah itu sendiri baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta sumberdaya masyarakat yang ada di dalam desa sebagai penerima manfaat dari kebijakan dana desa membangun khususnya di Kabupaten Poso. Implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Poso dilaksanakan dengan baik namun belum optimal karena sumber daya terbatas. Dalam hal ini sumber daya manusia yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan aktornya tidak hanya masyarakat desa tetapi aparat desa juga

### **b. Konteks Kebijakan**

#### **1. Kekuatan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat**

implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik berdasarkan pendapat Grindle tersebut maka hendaknya memperhatikan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Undang Undang Desa dengan penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stekholder seperti LSM Universitas dan Media. Sinergi antar aktor yang dilakukan dalam rangka dan mendukung atau mengorganisir kegiatan kegiatan setiap sektor dan aktor dalam satu sistim yang terorganisir.

#### **2. Karaktersistik lembaga (*Institution and Regime Characteristics*)**

Lembaga pelaksana suatu kebijakan memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dari kebijakan itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya kelembagaan pelaksana kebijakan dana desa yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD) Desa, Kecamatan dan desa dalam hal ini adalah sesuai dengan lokasi penelitian adalah Kecamatan Poso Pesisir, Lage dan Lore Selatan. Untuk masalah teknis pelaksanaan yang bertanggung jawab adalah pelaksana teknis yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD).

Untuk karakter lembaga dan penguasa dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing masing dari perangkat desa terkait dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola dana desa. Setiap aparat desa tentu memiliki peran nya masing-masing dalam implementasi kebijakan dana desa.

### 3. Kepatuhan dan daya tanggap (*Institution and Regime Characteristics*)

Kepatuhan dan daya tanggap dalam pelaksanaan suatu kebijakan dari aparaturnya yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan tersebut dan masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memperlancar segala kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dana desa yang merupakan kebijakan unggulan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Poso dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan demikian bahwa jelas setiap keputusan terkait dengan kegiatan kebijakan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten yang dibantu oleh tim yang dibentuk baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa.

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan untuk menjawab permasalahan tentang implementasi kebijakan dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Poso berjalan efektif, dari aspek kepentingan yang dipengaruhi, derajat perubahan, yang diinginkan, letak pengambilan keputusan dan tipe manfaat.
- 2) Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Poso belum berjalan efektif, yaitu program kegiatan dan sumber daya yang dilibatkan. Untuk program kegiatan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur desa lebih menonjol daripada program pemberdayaan masyarakat desa. Untuk sumber daya yang dilibatkan khususnya perangkat desa dan BPD ada berpendidikan SMP serta sebagian besar belum berpengalaman untuk mengelola dana desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Abdullah, M. Syukur, 1987. *Administrasi Pembangunan ( Bunga Rampai )*. Ujung Pandang : Unhas.
- Anderson, James E., 1979. Second edition. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Bromley, Daniel W., 2009. *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell Ltd.
- Bungin, Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, W. John, 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Ed. Ketiga. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Domain, Tjahjanuli, 2010. *Kebijakan Kerjasama Antara Daerah dalam Perspektif Sound Governance*, Surabaya: Penerbit Jenggala Pustaka Utama.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, Merille.S (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princenton University Press.

- Heclo, H., 2002. *Review Article: Policy Analyssis*. British Journal of Political Science, 2.
- Henry, Nicholas, 1995. *Public Administration & Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall-Inc.
- Hogerwerf, A., 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Imawan, Riswandha, 2005. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kadji, Yulianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Prespektif Realitas*. Tulung Agung: Cahaya Abadi.
- Keban, Yeremias. T., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexi J., 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A.R. 2003. *Perkembangan dan Penerapan Studi KebijaksanaanDilihat Dalam Kaitan Disiplin dan Sistem Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.